

PENOLAKAN SUBJEK DI DALAM “*PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS*” KARYA LUDWIG WITTGENSTEIN

Riko

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indrapasta PGRI

Email: rikophilo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan upaya untuk mendiskusikan kembali asumsi dasar yang selama ini telah terbangun mengenai Wittgenstein II, terutama tentang kehadiran manusia sebagai subjek yang otonom dalam bahasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kritis dan metode kepustakaan. Untuk menopang pernyataan tesis, penelitian ini memanfaatkan teori otonomi, konsep objektivasi, dan teori strukturalisme. Hasil penelitian ini ialah Ludwig Wittgenstein telah memperlakukan bahasa dan subjek sebagai entitas yang terpisah, dan sekaligus menempatkan subjek ke dalam posisi yang inferior di hadapan bahasa. Selain itu, Ludwig Wittgenstein secara implisit menolak kehadiran subjek yang otonom di dalam bahasa. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa Ludwig Wittgenstein di dalam *Philosophical Investigations* menolak kehadiran subjek dalam menentukan makna kata.

Kata kunci: Ludwig Wittgenstein; Objektivasi; Otonomi; *Philosophical Investigations*; Strukturalisme; Subjek.

Pendahuluan

Dalam bukunya yang kedua, *Philosophical Investigations* (1953), Ludwig Wittgenstein (selanjutnya disebut ‘Wittgenstein II’) menolak gagasannya mengenai proposisi bahasa sebagai pembentuk makna kata. Di buku ini, dia mengatakan bahwa makna kata terdapat di dalam penggunaan suatu kata di dalam bahasa. Makna bahasa tidak dikontrol oleh proposisi elementer, melainkan pada bagaimana bahasa digunakan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hanfling (2003: 89). Bahkan, dia mengatakan bahwa karya kedua Wittgenstein ini menunjukkan upaya humanisasi (*humanisation*) bahasa; sebab, masih menurut Hanfling, pemaknaan suatu kata sudah diserahkan kepada manusia yang hidup sehari-hari.

Pembacaan Hanfling atas karya Wittgenstein II ini menarik perhatian penulis. Hanfling (2003: 87) mengasumsikan bahwa karya Wittgenstein II ini berpihak kepada manusia sebagai pengguna bahasa. Baginya, ketika Wittgenstein II menolak campur tangan sains dalam membongkar makna kata, maka di situ letak penghargaan Wittgenstein II kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, manusia tidak perlu bergantung pada sains dalam memahami dunia dan kehidupan di sekelilingnya. Cukup manusia dengan perangkat kulturnya saja yang memegang peranan di dalam memahami dunia.

Kesan penulis terhadap pembacaan Hanfling atas Wittgenstein II adalah seolah-olah subjek penutur sebagai pengguna bahasa masih hadir di situ. Timbul keraguan di dalam benak penulis apakah Wittgenstein II benar-benar menerima kehadiran subjek penutur di dalam bahasa. Bukankah tesis utama Wittgenstein II justru mengatakan bahwa makna kata adalah bagaimana suatu kata digunakan di dalam bahasa?

Penelitian ini merupakan upaya untuk mendiskusikan kembali asumsi dasar yang selama ini telah terbangun mengenai Wittgenstein II. Penulis mengamati bahwa di dalam pemikiran Wittgenstein II terjadi ketumpang-tindihan antara tesis sentral dan argumentasi yang dibangunnya dalam mengajukan gagasan tentang makna kata. Di sini, penulis akan

berargumentasi bahwa Ludwig Wittgenstein di dalam prinsip *meaning is use* menolak kehadiran subjek dalam menentukan makna bahasa.

Tinjauan Pustaka

Dalam menjelaskan prinsip *meaning is use*, hampir seluruh komentator Wittgenstein II bersepakat bahwa prinsip ini lebih menekankan peran struktur di luar subjek dalam menentukan makna kata. Artinya, meski tidak menyinggung peran subjek dalam menentukan makna kata, para komentator itu tidak mengambil posisi atau menentukan sikap bahwa Wittgenstein II menolak atau menerima kehadiran subjek.

Grayling (1996: 74) mengatakan bahwa prinsip *meaning is use* dapat dipahami dari relasi antara makna dan pemahaman. Grayling menjelaskan bahwa pemahaman bagi Wittgenstein bukan proses atau kondisi mental batin, melainkan “penguasaan suatu teknik”, dan teknik tersebut dapat dikuasai dengan mematuhi aturan penggunaan suatu ungkapan bahasa. Sementara itu, makna merupakan hasil jalinan antara bahasa dan subjek, yakni cara subjek menggunakan bahasa, baik dalam berhubungan antar-subjek maupun relasi antara subjek dan dunia.

Menurut penulis, di sini Grayling hendak menunjukkan bahwa suatu kata hanya dapat dimungkinkan kebermaknaannya sejauh terjadi proses saling terhubungnya antara subjek yang satu dan lainnya, dan saling terhubungnya antara subjek dan dunia. Namun, Grayling menganggap bahwa bukan subjek yang mengandalkan proses mental yang dapat memperoleh makna. Artinya, proses mental tidak berperan dalam memahami penggunaan suatu kata. Hanya subjek yang mematuhi aturan penggunaan suatu kata yang dapat mengerti makna kata. Selain itu, penekanannya pada penguasaan teknik juga memunculkan kesan bahwa bahasa, sebagai sebuah alat komunikasi, memiliki tekniknya tersendiri, yang ketika ingin digunakan oleh subjek, maka subjek harus mendatangi atau mendekati bahasa dan mempelajari bagaimana berlakunya suatu kata sehingga dapat membuat kata-kata tersebut bermakna ketika digunakan.

Rudd (1997: 501) mengklaim bahwa *meaning is use* merupakan doktrin eksternalisme. Eksternalisme yang dimaksudkannya adalah doktrin yang mengatakan bahwa pikiran (*mind*) bersifat tidak dapat memenuhi dirinya sendiri dalam memahami makna kata. Jadi, dalam rangka memahami kondisi mental, sebuah rujukan kepada fakta sosial atau lingkungan fisik di mana subjek berada harus diturutsertakan di situ. Argumen Wittgensteinian untuk eksternalisme itu adalah makna suatu kata tidak dapat dipahami berdasarkan perasaan subjektif belaka. Subjek bisa saja merasakan suatu perasaan tertentu atas suatu peristiwa. Namun, perasaan subjektif itu tidak bisa digunakan sebagai bukti memahami makna suatu kata. Bukti dari kemampuan kita memahami makna suatu kata adalah kemampuan menggunakan kata secara benar. Memahami adalah sesuatu yang termanifestasi di dalam praktik menggunakan kata yang sesuai dengan konteks. Jadi, pemahaman tidak bisa dianggap berada di luar konteks digunakannya suatu kata.

Klaim eksternalisme *meaning is use* mengandaikan bahwa kondisi mental subjek pun tidak bisa dipahami jika mengabaikan konteks. Klaim ini, menurut hemat penulis, meletakkan *meaning is use* ke dalam posisi yang radikal. Upaya untuk memahami kondisi mental sendiri pun, subjek tidak bisa serta-merta memutuskannya sendiri.

Dalam menafsirkan prinsip *meaning is use*, McGinn (2002: 54–55) mengatakan bahwa peran konteks atau cakrawala untuk memahami makna suatu ungkapan bahasa bersifat sentral. Dengan menyitir contoh “orang asing” yang diberikan Wittgenstein II di paragraf 20, McGinn menekankan bahwa makna suatu kata tidak terdapat pada pikiran penutur ungkapan

bahasa, melainkan pada cakupan cakrawala yang aktual dan potensial dalam menggunakan bahasa. Jadi, makna suatu ungkapan bahasa bukan terdapat pada momen ketika bahasa tersebut sedang digunakan, melainkan cara penggunaan ungkapan bahasa tersebut memang sudah disediakan oleh latar belakang suatu konteks atau cakrawala.

Arti penting *meaning is use* bagi McGinn, menurut penulis, adalah makna suatu ungkapan bahasa pada hakikatnya sudah disediakan oleh konteks atau cakrawala yang sudah tercukupi di dalam konteks atau cakrawala itu sendiri, sehingga ketika subjek sedang menggunakan suatu kata, makna yang terkandung pada kata tersebut tidak diciptakan secara tiba-tiba oleh subjek pada saat dituturkan atau dituliskan. Subjek harus menyadari sepenuhnya bahwa di luar dirinya sudah terhampar makna kata yang tidak dapat ditundukkan begitu saja oleh kehendak subjektivitasnya. Subjek hanya bisa memilah dan memilih kata-kata yang jika digunakan dapat memenuhi ekspresi dirinya dengan terlebih dahulu mencocokkannya kepada konteks atau cakrawala makna kata yang sudah terhampar tersebut.

Mengenai *meaning is use*, Lycan (2008: 78) mengatakan bahwa bahasa adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek dengan sepenuhnya mematuhi aturan dan konvensi yang berlaku. Di sini, Lycan hendak menunjukkan betapa bahasa bukan urusan proposisi yang diasumsikan harus terkandung di dalam suatu ungkapan bahasa. Bagi Lycan, tidak penting apakah suatu kalimat atau pernyataan mengandung proposisi atau tidak. Terhadap contoh tukang bangunan yang diberikan Wittgenstein II, Lycan mengatakan yang terpenting dari kata “papan” bukan mengandung proposisi atau tidak, melainkan tindakan sang asisten yang bermanfaat, yakni sehubungan dengan penggunaan kata tersebut di dalam permainan bahasa mendirikan bangunan.

Arti penting dari *meaning is use* bagi Lycan, menurut penulis, adalah sampai sejauh mana suatu ungkapan bahasa dapat memberikan pengalaman bermakna bagi subjek, misalnya, bekerja sama dalam mendirikan bangunan. Suatu ungkapan bahasa hanya dapat bermakna sejauh terpenuhinya baik aturan maupun konvensi yang terkandung di dalam bahasa. Tanpa mempertimbangkan aturan dan konvensi, maka suatu kata tidak akan memunyai makna karena tidak akan ada manfaat yang bisa dipetik dari suatu ungkapan bahasa. Artinya, tanpa aturan dan konvensi, suatu kata yang digunakan tidak akan berarti apa-apa.

Meskipun Wittgenstein II dan para komentatornya bersepakat bahwa makna kata pada prinsip *meaning is use* menunjukkan keberpihakan kepada manusia secara umum, penulis justru menilai keberpihakan itu tidak sungguh-sungguh bulat. Penulis merasa ragu-ragu dengan kesungguhan keberpihakan Wittgenstein II terhadap manusia seperti yang dieksplicitkan oleh Wittgenstein II sendiri atau yang diyakini oleh para komentatornya.

Untuk keperluan analisis terhadap pernyataan tesis, penulis menggunakan dua buah teori, satu buah konsep. Ketiga hal tersebut digunakan sebagai penuntun kerangka pemikiran atas sikap penulis terhadap pemikiran yang dijadikan objek material di dalam penelitian ini.

Kedua teori dan satu konsep yang digunakan di sini antara lain:

1. Teori Otonomi.
Teori otonomi yang digunakan lebih bersifat umum. Teori ini mengatakan bahwa kapasitas seorang individu dalam hal menentukan kemandirian sikap atau tindakan (*self-determination* atau *self-governed*) tanpa dipengaruhi unsur di luar diri individu yang bersangkutan (Christman, 2011 dan Dryden, 2010).
2. Konsep Objektivasi.
Konsep ini mengatakan bahwa kenyataan hidup sehari-hari yang sudah dibentuk oleh suatu tatanan obyek-obyek yang telah dinamakan sebelumnya oleh manusia lainnya (Berger & Luckmann, 2012:31).

3. Teori Strukturalisme.

Teori strukturalisme adalah sebuah sistem pemikiran yang “mengatasi” individu dan memaksa individu yang untuk berpikir ke dalam sistem pemikiran (Sturrock, 2003:19).

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis kritis dan metode kepustakaan. Metode analisis kritis yang penulis maksudkan di sini adalah upaya menyeleksi dengan cara merangkum dan mempertimbangkan masalah sehingga dapat direduksi, direposisi, dan dipaparkan secara sistematis.

Sementara itu, metode kepustakaan adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat data pustaka serta mengolah bahan penelitian (Mustika, 2008:3).

Sumber pustaka primer yang digunakan di sini adalah buku *Philosophical Investigations* karya Ludwig Wittgenstein. Sementara itu, sumber sekunder yang dapat digunakan sebagai pembandingan dalam memahami pemikiran Ludwig Wittgenstein juga dipergunakan di sini.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis di dalam penelitian ini akan ditempuh dengan tiga cara secara bertahap: pertama, menunjukkan kedudukan makna kata; kedua, menunjukkan relasi antara bahasa dan subjek; dan ketiga, menunjukkan penolakan kehadiran subjek dalam menentukan makna kata.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian di dalam tesis ini merupakan upaya pembuktian penolakan kehadiran subjek pada prinsip *meaning is use* yang terdapat di buku *Philosophical Investigations* karya Ludwig Wittgenstein. Upaya pembuktian itu dilakukan dengan cara menelusuri kedudukan dan peran subjek. Prinsip *meaning is use* ini mengakui bahwa makna kata berada pada penggunaan kata di dalam bahasa, sedangkan manusia adalah subjek yang mencari makna kata yang telah tersedia di dalam bahasa. Kata “bahasa” yang dimaksud oleh Wittgenstein II adalah bahasa sehari-hari (Wittgenstein 2009, para. 120).

Selama ini, prinsip *meaning is use* dipahami sebagai bentuk pengakuan pemulangan bahasa kepada manusia yang hidup sehari-hari. Menurut penulis, ada dua alasan yang menggiring para komentator menafsirkannya seperti itu, selain dari definisi yang sudah dibatasi oleh Wittgenstein II sendiri: pertama, dari tesis sentral di paragraf 43 yang berbunyi makna kata berada pada penggunaannya di dalam bahasa; dan, kedua, dari argumennya di paragraf 116 yang mengatakan hendak membawa bahasa yang semula penggunaannya cenderung bersifat metafisika kembali ke penggunaan sehari-hari.

Untuk paragraf 43, alur logis yang secara umum dipakai adalah jika makna kata berada pada bagaimana suatu kata digunakan di dalam bahasa, maka secara akal sehat dapat segera dipahami bahwa penggunaannya pasti manusia. Alur logis ini memang masuk akal. Selain dari penegasan Wittgenstein II di paragraf 25 yang mengatakan bahwa term “bahasa” yang dimaksudkannya adalah bahasa manusia, argumen-argumen yang dikemukakannya memang mencirikan bahasa yang digunakan oleh manusia (periksa: Wittgenstein 2009, para. 23).

Untuk paragraf 116, alur logis yang dipakai umumnya dipakai adalah penggunaan bahasa untuk tujuan penelusuran metafisik berisiko mereduksi kehidupan manusia yang plural, maka upaya pemetafisikaan bahasa hanya akan bersifat sia-sia karena kalangan metafisikus saja yang akan mengerti makna katanya. Akibatnya, kehidupan sehari-hari yang kompleks

dan partikular menjadi tidak tercakupi oleh makna kata yang sudah direduksi oleh kalangan metafisikus.

Meski Wittgenstein II dan para komentatornya bersepakat bahwa makna kata pada prinsip *meaning is use* menunjukkan keberpihakan kepada manusia secara umum, penulis justru menilai keberpihakan itu tidak sungguh-sungguh bulat. Penulis merasa ragu-ragu dengan kesungguhan keberpihakan Wittgenstein II terhadap manusia seperti yang dieksplicitkan oleh Wittgenstein II sendiri atau yang diyakini oleh para komentatornya.

Upaya untuk membuktikan pernyataan tesis dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, menunjukkan kedudukan makna kata; kedua, menunjukkan relasi antarabahasa dan subjek; dan ketiga, menunjukkan penolakan kehadiran subjek di dalam bahasa.

Untuk menunjukkan kedudukan makna kata, batas tegas antara peran bahasa dan subjek harus diperlihatkan terlebih dahulu. Cara yang dilakukan untuk menunjukkan batas-batas yang tegas itu adalah dengan memisahkan kedudukan dan peran antara bahasa dan subjek dalam mewujudkan makna kata. Dengan pemisahan batas yang tegas ini, kedudukan makna kata akan menjadi jelas, apakah kedudukannya berada pada bahasa atau subjek. Bertolak dari kedudukan makna kata itu, penulis dapat melanjutkan pada upaya kedua, yakni menunjukkan relasi antara bahasa dan subjek. Setelah mendapatkan pola relasi antara bahasa dan subjek, penulis dapat menunjukkan penolakan kehadiran subjek.

Batas peran yang tegas itu diperoleh dari memperhatikan argumen-argumen yang dinyatakan Wittgenstein II yang secara eksplisit menunjukkan bagaimana makna kata terwujud. Argumen-argumen yang digunakan oleh penulis untuk membuktikan bagaimana makna kata terwujud itu di dalam Wittgenstein II adalah paragraf 23, 43, 141, dan 210. Keempat paragraf itu menunjukkan bahwa makna kata terwujud berdasarkan bagaimana suatu kata biasa digunakan di dalam kehidupan manusia sehari-hari atau manusia pada umumnya dalam berbahasa. Selain itu, jika ada makna kata yang tidak dipahami oleh lawan bicara, lawan bicara bisa bertanya kepada pembicaranya, dan pembicara tersebut harus memastikan bahwa makna dari kata yang digunakannya itu memang sudah dipahami oleh orang kebanyakan berdasarkan kebiasaan berbahasa.

Berdasarkan bukti keras itu, penulis untuk sementara menyimpulkan bahwa perwujudan makna kata bagi Wittgenstein II berada pada (jejaring) bahasa, bukan pada manusia sebagai subjek. Setelah mendapati bagaimana terwujudnya makna kata, penulis melanjutkan kepada upaya penegasan kedudukan makna kata.

Secara intuitif, penulis menengarai bahwa ada batas tegas yang digariskan oleh Wittgenstein II terhadap kedudukan makna kata, yakni makna kata seolah-olah berada di struktur di luar struktur subjek. Untuk membuat intuisi ini menjadi sumber pengetahuan yang mudah diterima nalar sehingga dapat diperiksa argumen-argumennya oleh siapa pun, penulis meminjam bantuan berupa konsep, yang untuk itu penulis menggunakan konsep objektivasi. Dalam hemat penulis, konsep objektivasi dapat menerjemahkan intuisi penulis dalam melihat kedudukan makna kata dalam prinsip *meaning is use*. Konsep objektivasi ini mengatakan bahwa kenyataan hidup sehari-hari sudah dibentuk oleh suatu tatanan obyek-obyek yang telah dinamakan oleh subjek sebelumnya (Berger and Luckmann, 2012:31). Namun, konsep objektivasi di sini telah direduksi terlebih dahulu, yakni dengan mengandaikan ketiadaan keberadaan dan peran subjek yang sebelumnya berlaku di konsep ini.

Berdasarkan konsep objektivasi minus subjek ini, penulis mengandaikan bahwa makna kata bagi Wittgenstein II adalah seperti tatanan obyek-obyek. Tatanan obyek-obyek berada di struktur di luar diri subjek. Dengan demikian, makna kata adalah tatanan obyek-obyek yang

berada di struktur di luar diri subjek. Sampai di sini, kedudukan makna kata sudah dieksplisitkan batasnya secara tegas.

Setelah kedudukan makna kata terungkap tegas batasnya, langkah kedua ialah menggunakan hasil penelusuran kedudukan makna kata digunakan untuk mencari relasi antara bahasa dan subjek.

Sebagaimana dikatakan oleh Wittgenstein II bahwa makna kata bergantung pada penggunaannya di dalam bahasa, dan tesis ini juga mengindikasikan bahwa makna kata bukan pada manusia, maka secara intuitif penulis memahami terdapatnya ketergantungan subjek pada bahasa. Pada poin ketergantungan ini, penulis mendapatkan kesan terkandungnya relasi di antara bahasa dan subjek. Ringkasnya, subjek bergantung pada bahasa secara relasional.

Berdasarkan intuisi tersebut, penulis meminjam bantuan dari teori strukturalisme. Melalui teori strukturalisme, penulis meyakini bahwa relasi antara bahasa dan subjek yang semula terpahami secara intuitif dapat dipahami penalarannya. Teori strukturalisme meyakini keberadaan sistem pemikiran yang “melampaui” individu berbentuk kesadaran kolektif dan memunyai kekuasaan untuk memaksa individu supaya berpikir ke dalam sistem pemikiran kesadaran kolektif itu (Sturrock 2003:19 & 29).

Dalam teori strukturalisme, ada relasi biner yang terjalin, yakni antara kesadaran kolektif dan individu. Di dalam relasi biner ini juga terkandung logika oposisi, yakni adanya pertentangan di antara kedua sisi. Selain itu, di antara dua sisi ada salah satu sisi yang mendominasi sisi lainnya.

Dengan bertolak dari teori strukturalisme, penulis mengandaikan bahwa relasi antara bahasa dan subjek adalah seperti relasi yang terdapat pada kesadaran kolektif dan individu. Kesadaran kolektif merupakan sistem pemikiran yang bersifat “melampaui” dan memunyai kekuasaan untuk memaksa individu menuruti sistem pemikiran. Penulis memosisikan bahasa seperti kesadaran kolektif dan memosisikan subjek seperti individu. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa relasi antara bahasa dan subjek adalah bahasa sebagai sistem pemikiran bersifat “melampaui” subjek dan memunyai kekuasaan untuk memaksa subjek menuruti sistem pemikiran yang terdapat di dalam bahasa. Wittgenstein II telah memperlakukan bahasa dan subjek sebagai entitas yang terpisah, dan sekaligus menempatkan subjek ke dalam posisi yang inferior di hadapan bahasa.

Sampai di sini, upaya penelusuran kedudukan makna kata dan relasi antara bahasa dan subjek telah diselesaikan oleh penulis. Untuk selanjutnya, penulis melangkah ke tahap ketiga, yaitu membuktikan penolakan kehadiran subjek.

Hanya dengan berkaca pada kedudukan makna kata dan relasi antara bahasa dan subjek, pintu gerbang menuju ke penelusuran kedudukan dan peran subjek sebenarnya sudah mulai terlihat. Dari kedua langkah itu, penulis mendapatkan sinyal bahwa ada gejolak status subjek di situ. Pertama, makna kata ternyata berada pada bahasa, bukan pada manusia sebagai subjek. Kedua, terdapatnya relasi yang timpang antara bahasa dan subjek. Penulis mendapati bahwa dalam mendapatkan makna kata, subjek tidak hanya bergantung pada apa yang telah disediakan oleh bahasa. Lebih jauh, bahasa bahkan terkesan “melampaui” subjek karena memunyai kekuasaan untuk memaksakan sistemnya kepada subjek.

Pernyataan Wittgenstein II mengenai kedudukan dan peran subjek terlihat terdapat pada penolakannya atas bahasa privat. Bahasa privat adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh subjek penuturnya sendiri. Kata-kata yang dilontarkan oleh subjek hanya bisa bernilai

komunikatif sejauh kata-kata tersebut bukan karangan sendiri. Nilai komunikasinya hanya bisa terpenuhi sejauh kata-kata yang digunakan oleh subjek memang sudah ada di dalam bahasa.

Penolakannya atas bahasa privat, di mata penulis, secara implisit menunjukkan penolakannya atas kehadiran subjek yang otonom di dalam bahasa, karena, terlepas bernilai komunikatif bagi orang lain atau tidak, sebuah kata dan makna kata baru yang muncul di dalam pikiran subjek sekaligus menunjukkan bermainnya peran rasio di situ. Dengan demikian, menolak bahasa privat berarti menolak kehadiran subjek.

Simpulan dan Saran

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan penulis adalah bagaimana membuktikan penolakan kehadiran subjek di dalam *Philosophical Investigations* Ludwig Wittgenstein. Langkah untuk membuktikan penolakan kehadiran dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, menunjukkan kedudukan makna kata; kedua, menunjukkan relasi antara bahasa dan subjek; ketiga, menunjukkan penolakan kehadiran subjek di dalam bahasa.

Untuk menunjukkan kedudukan makna kata, batas tegas antara peran bahasa dan subjek harus diperlihatkan terlebih dahulu. Cara yang dilakukan untuk menunjukkan batas-batas yang tegas itu adalah dengan memisahkan kedudukan dan peran antara bahasa dan subjek dalam mewujudkan makna kata. Dengan pemisahan batas yang tegas ini, kedudukan makna kata akan menjadi jelas, apakah kedudukannya berada pada bahasa atau subjek. Bertolak dari kedudukan makna kata itu, penulis dapat melanjutkan pada upaya kedua, yakni menunjukkan relasi antara bahasa dan subjek. Setelah mendapatkan pola relasi antara bahasa dan subjek, penulis dapat menunjukkan penolakan kehadiran subjek.

Meski penelitian ini terinspirasi dari temuan Hanfling yang meyakini bahwa Wittgenstein II telah berupaya melakukan pemanusiaan (*humanisation*) bahasa, yakni memberikan sifat-sifat manusia pada bahasa, agaknya temuan penulis berada pada posisi yang saling berseberangan.

Bagi Hanfling, pemanusiaan bahasa pada Wittgenstein II adalah ketika makna kata tidak lagi ditelusuri berdasarkan cara kerja ilmu pengetahuan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran. Penulis menganggap bahwa Hanfling, dalam memberikan penilaiannya itu, merujuk pada pengertian manusia yang antropologis, yakni manusia berada dalam lingkung sistem budaya tertentu.

Bertolak dari penilaian penulis itu, maka kata "*humanisation*" yang disematkan Hanfling atas pemikiran Wittgenstein II itu tidak ada keterkaitan sama sekali dengan proyek pencerahan yang bermula pada paham humanisme kritis zaman renaissance abad ke-14 sampai dengan abad ke-16 yang memuncak pada humanisme pencerahan Eropa abad ke-18. Humanisme kritis hingga humanisme pencerahan ini mengandaikan bahwa manusia tidak mau lagi terkungkung dalam sistem budaya atau agama tertentu sehingga lebih mengutamakan rasionalitas subjek (Hardiman 2012: 7--11).

Hanfling, menurut penulis, memang segaris dengan pemikiran Wittgenstein II. Dapat dikatakan, Hanfling berhasil melakukan pembacaan teks Wittgenstein II sebatas dalam konteks menjelaskan maksudnya saja. Hanfling tidak menggali kemungkinan bahwa makhluk seantropologis pun dapat saja dan bahkan mungkin saja berdaya cipta.

Di dalam konteks ini penulis memosisikan diri. Penulis tidak menolak bahwa manusia memang berada pada lingkup budayanya. Namun, bukankah budaya suatu komunitas manusia tidak datang tiba-tiba saja dari langit? Apakah tidak ada celah sama sekali bagi

manusia antropologi untuk berdaya cipta? Maka, penulis mencoba meneruskan temuan Hanfling ini dengan sekaligus berupaya melakukan upaya korektif atasnya, yakni dengan mengajukan konsep bahasa laten. Konsep bahasa laten memang belum sempurna untuk dijadikan jalan keluar bagi dilema prinsip *meaning is use*. Namun, tawaran konsep bahasa laten dapat dijadikan batu loncatan untuk menuju kepada penelitian yang berikutnya.

Di sisi lain, Austin dianggap juga sudah mendapati absennya subjek di dalam prinsip *meaning is use* dari Wittgenstein II. Dalam konsep tindakan performatif, penulis mendapatkan kesan upaya Austin untuk menghadirkan pentingnya subjek di situ. Namun, penulis mendapati bahwa hadirnya manusia di situ tidak dalam konteks menciptakan kata atau makna kata. Austin sekadar memanfaatkan kata atau makna kata yang sudah tersedia pada bahasa. Dengan demikian, Austin sebenarnya tidak jauh berbeda dari Wittgenstein II dalam mengakui kedudukan kata dan makna kata.

Dengan tertolaknya subjek di dalam prinsip *meaning is use* ini, bagaimana implikasinya terhadap persoalan etika Kant? Etika Kant yang bertumpu pada maksim (dirumuskan oleh diri sendiri), bagi penulis, sarat dengan pertimbangan subjektivitas diri (Kant, 2002: 50, 51, 52). Maksim itu pun harus tunduk pada hukum umum atau prinsip objektif dan rasional dengan mengabaikan pilihan suka atau tidak suka. Hukum umum itu menyatakan bahwa maksim yang dirumuskan seorang individu harus bersesuaian dengan prinsip hukum umum (Kant, 2002: 37).

Dari sudut pandang prinsip *meaning is use*, etika Kant yang cenderung monologistik secara otomatis tidak bisa diterima. Prinsip *meaning is use* menghendaki setiap orang untuk mematuhi peraturan main yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam jejaring pengetahuan bersama. Kehadiran subjek yang membawa pengetahuan berlainan dari pengetahuan bersama akan dipandang sebagai bentuk pelanggaran peraturan main. Selain itu, etika Kant yang bertumpu pada maksim akan termasuk ke dalam kategori bahasa privat, suatu varian bahasa yang ditolak oleh Wittgenstein II.

Daftar Pustaka

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2012). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (H. Basari, Trans.). Jakarta: LP3ES.
- Christman, J. (2011). Autonomy in Moral and Political Philosophy. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2011.). Diakses dari <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/autonomy-moral/>
- Dryden, J. (2010). Autonomy. *Internet Encyclopedia of Philosophy*. Diakses dari <http://www.iep.utm.edu/autonomy/>
- Grayling, A. C. (1996). *Wittgenstein*. Oxford & New York: Oxford University Press.
- Hanfling, O. (2003). *Wittgenstein and the Human Form of Life*. London & New York: Taylor & Francis e- Library.
- Hardiman, F. B. (2012). *Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar tentang Manusia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kant, I. (2002). *Groundwork for Metaphysics of Moral*. (A. W. Wood, Trans.). New Haven & London: Yale University Press.
- Lycan, W. G. (2008). *Philosophy of Language: A Contemporary Introduction*. New York: Taylor & Francis e-Library.

- McGinn, M. (2002). *Routledge Philosophy Guidebook to Wittgenstein and the Philosophical Investigations*. New York: Taylor & Francis e-Library.
- Mustika, Z. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rudd, A. (1997). Two Types of Externalism. *The Philosophical Quarterly*, 47(189), 501–507. doi:10.1111/1467-9213.00074
- Sturrock, J. (2003). *Structuralism* (2nd ed.). Iowa: Blackwell Publishing Ltd.
- Wittgenstein, L. (2009). *Philosophical Investigations*. (G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker, & J. Schulte, Trans., P.M.S. Hacker & J. Schulte, Eds.) (Revised 4th.). West Sussex: Wiley-Blackwell.